

**PROGRAM PANDU GEMPITA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI KOTA PAYAKUMBUH)**

Artikel

RIDA ANANDA
1421613020



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2016**

**PROGRAM PANDU GEMPITA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI KOTA PAYAKUMBUH)**

Oleh: Rida Ananda (1421613020)

(Dibawah bimbingan Prof .Dr. Ir. Asdi Agustar, MSc dan Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si)

Abstrak

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh adalah melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kab/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Pandu Gempita merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang dimulai sejak tahun 2013 dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah *pilot project*. Dalam penelitian ini yang dilihat adalah bagaimana pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, apakah tujuan dari pelaksanaan program Pandu Gempita sudah dapat dicapai di Kota Payakumbuh dan persoalan-persoalan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 dibentuk sebuah unit layanan satu atap dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Unit ini menggunakan skema beragam loket dan beragam layanan. UPT-KAN menganut model *True One-Stop* dengan wadah Lokasi Fisik Kantor. Model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dan melibatkan berbagai kewenangan. Program Pandu Gempita melalui UPT-KAN secara tidak langsung dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Namun, sejauh ini UPT-KAN baru melakukan proses administratif, substansi pelayanan satu atap dalam pengentasan kemiskinan belum lagi bisa diwujudkan. UPT-KAN belum memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi UPT-KAN dalam merangkul program-program penanggulangan kemiskinan yang ada pada SKPD teknis. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih berjalan parsial. Terhadap Sumber Daya Manusia dan pendanaan diperlukan dukungan yang lebih baik. Selama ini untuk personel yang diletakan pada UPT-KAN rangkap jabatan dengan pekerjaan yang ada pada SKPD pengirim. Hal ini menyebabkan personel tersebut tidak maksimal dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu evaluasi, sinergitas dan pembinaan pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan program ini.

Kata kunci: pandu gempita, UPT-KAN, ketercapaian tujuan program

A. Latar Belakang

Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : (a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan (d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan

masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah keluarga miskin relatif besar. Berdasarkan data BPS Kota Payakumbuh, Tingkat Kemiskinan (2014) adalah sebesar 7,01 % dari jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata propinsi Sumatera Barat, dimana pada tahun yang sama hanya Tingkat Kemiskinannya sebesar 6,71 %. Sebagaimana halnya dengan kebijakan nasional, penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas pembangunan Kota Payakumbuh. Berbagai program sudah dan sedang diimplementasikan. Salah satunya melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kab/Kota Sejahtera (Pandu Gempita).

Pandu Gempita merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial yang dimulai sejak tahun 2013. Ada lima lokasi telah menjadi pilot *project* Pandu Gempita, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Sukabumi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bantaeng. Pandu Gempita diharapkan menjadi sebuah sistem pelayanan terpadu dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan nasional bertumpu pada keadilan untuk semua, serta melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut jelas dibutuhkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perubahan paradigma tersebut adalah dengan mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada kelompok sasaran, baik penduduk miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya. Lebih dari 20 program pelayanan penduduk miskin dan penyandang masalah sosial lainnya yang dikelola parsial, sektoral, fragmentaris oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang belum maksimal dirasakan manfaatnya. Kegiatan di Pandu Gempita meliputi, membangun komitmen kerjasama kemitraan antara Kemensos dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pilot *project*.

B. Masalah Penelitian

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan inovasi kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah Kota Payakumbuh menciptakan terobosan dengan membentuk suatu unit penanggulangan kemiskinan yang dinamakan dengan Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang merupakan implementasi program Pandu Gempita dengan bekerja sama dengan Kemensos. Pembentukan lembaga yang khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dilandasi dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Kota Payakumbuh. Hal ini sesuai dengan

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana diamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Kota Payakumbuh memberikan layanan bagi masyarakat miskin secara komprehensif, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi merupakan suatu masalah klasik yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Berlatar belakang dari masalah ini, sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013. UPT-KAN mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Selain itu, alasan dibentuknya UPT-KAN di Kota Payakumbuh ini karena melihat cukup tingginya angka kemiskinan di Kota Payakumbuh.

Melihat kebijakan pembentukan UPT-KAN merupakan inovasi baru sebagai perwujudan program Pandu Gempita dalam penanggulangan kemiskinan yang baru berdiri dan telah diatur dalam Peraturan Walikota sebagai dasar hukum pembentukan unit ini.

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?

2. Apakah tujuan dari pelaksanaan program Pandu Gempita sudah dapat dicapai di Kota Payakumbuh?
3. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh.
2. Mengetahui ketercapaian tujuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh program Pandu Gempita?
3. Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi salah satu sumber pengkajian dan pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
3. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk mengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam operasional pelaksanaan UPT-KAN.
4. Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih jauh permasalahan pengentasan

kemiskinan dari perspektif lainnya

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kota Payakumbuh. Hal ini dikarenakan Kota Payakumbuh menjadi salah satu *pilot project* dari 5 Kab/kota dalam melaksanakan pelayanan terpadu penanganan masalah sosial tersebut. Ke 5 Kab/ Kota tersebut antara lain Sragen, Sukabumi, Bantaeng, Berau dan Payakumbuh. Untuk Kota Payakumbuh sendiri Unit Pelayanan tersebut bernama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Penelitian ini direncanakan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Pasca Sarjana Universitas Andalas.

F. Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data akan dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi realitas yang bermacam-macam di lapangan sehingga analisis menjadi lebih eksplisit, lebih nampak dan mudah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konsep yang terkait dengan topik penelitian untuk membantu memahami realitas yang ada di lapangan. Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.

Mengetahui proses pembentukan UPT-KAN di Kota Payakumbuh dianalisa dengan cara menelaah aturan pembentukannya yang didapat dari hasil telaah

dokumen dan wawancara dengan *key informan*, sedangkan pengelolaan UPT-KAN dianalisa melalui proses membandingkan aturan pengelolaan Pandu Gempita dengan pelaksanaan yang dilakukan dilapangan.

Keterkaitan antara proses pembentukan UPT-KAN dan pengelolaannya dengan keberlanjutan Program Pandu Gempita di analisa dengan konsep yang dikemukakan Khandker, Khaliliy, dan Khan dalam Syukur (2002), bahwa keberlanjutan lembaga keuangan berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) viabilitas kelembagaan, (2) viabilitas finansial, dan (3) viabilitas peserta (anggota). Viabilitas kelembagaan yaitu kelembagaan kredit (*delivery system*) dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Viabilitas finansial berarti pendapatan dari kredit (bunga), dapat menutupi seluruh biaya operasi pada periode waktu tertentu. Sementara viabilitas peserta (anggota) artinya keuntungan usaha yang dibiayai oleh kredit dapat menutup biaya kredit (bunga) dan pokok pinjaman.

G. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis dilapangan didapatkan hasil penelitian sebagai Berikut :

a. Pelaksanaan program Pandu Gempita telah berjalan di Kota Payakumbuh sejak akhir Tahun 2013 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh. Di Kota Payakumbuh program Pandu Gempita ini diberi nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Secara organisasi

dan pembentukannya, UPT-KAN ini telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

- b. Dalam hal ketercapaian tujuan pelaksanaan program pandu gempita telah terbangunnya layanan satu atap untuk penanggulangan kemiskinan, hal ini juga telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dalam jangka panjang bertujuan untuk penurunan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Namun, sejauh ini UPT-KAN baru melakukan proses administratif, substansi pelayanan satu atap dalam pengentasan kemiskinan belum lagi bisa diwujudkan.
- c. UPT-KAN belum memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pemerintah daerah belum melakukan pendeliasian wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi UPT-KAN dalam merangkul program-program penanggulangan kemiskinan yang ada pada SKPD teknis. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih berjalan parsial dengan pedoman pelaksanaannya masing-masing. Terhadap Sumber Daya Manusia dan pendanaan diperlukan dukungan yang lebih baik. Selama ini untuk personel yang diletakan pada UPT-KAN rangkap jabatan dengan pekerjaan yang ada pada SKPD pengirim. Hal ini

menyebabkan personel tersebut tidak maksimal dalam pekerjaannya. Sementara untuk pendanaan bantuan masyarakat miskin baru yang berasal dari sumbangan PNS Kota Payakumbuh.

H. Saran

Berdasarkan interpretasi hasil dan simpulan yang diperoleh, maka disusunlah saran sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program Pandu Gempita merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memberikan layanan secara terpadu bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh melalui Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Dalam perjalanannya program yang telah memasuki tahun ke-3 ini berbagai kendala pastinya banyak ditemukan, oleh sebab itu evaluasi, sinergitas dan pembinaan pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan program ini. Mengingat pelaksanaannya sampai saat ini belum dapat melaksanakan konsep *One Stop Service* dalam pelayanannya.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Pada UPT-KAN, sebaiknya pemerintah daerah memberikan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kota Payakumbuh.

- c. Perlu evaluasi terhadap penempatan personel yang berada pada UPT-KAN, mengingat pelaksanaan rangkap jabatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berjalan selama ini tidak maksimal. Personel tersebut tidak fokus dalam melaksanakan kegiatan di UPT-KAN. Dengan demikian, sebaiknya personel UPT-KAN ditunjuk personel yang tetap dengan pemberian tugas dan fungsi serta insentif yang jelas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- [BAPPEDA] Badan Perencana Daerah Kota Payakumbuh. 2013. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
- [Bappenas] Badan Perencanaan Nasional. 2008. Kemiskinan Telaah dan Strategi Penanggulangannya. www.bappenas.go.id diakses 20 Juli 2015
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. 2015. Hasil Pengolahan dan Analisis Tingkat Kemiskinan. Kota Payakumbuh. Bappeda.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Data Dan Informasi

- Kemiskinan. Jakarta. Indonesia.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Payakumbuh dalam Angka. Payakumbuh. Bappeda
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Payakumbuh dalam Angka. Payakumbuh. Bappeda
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Sumatera Barat dalam Angka. Padang. Bappeda.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010.
<http://www.bps.go.id/brsfile/kemiskinan01jul10.pdf>beritaesm
istatistikBadanPusatStatistik.pr
ofilkemiskinandIndonesiaMaret
2010, diakses tanggal 20 Juni 2015.
- [DEPDIKBUD] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Amitai, Etzioni, 1985. Organisasi-Organisasi Modern, Jakarta: UI press.
- Anwar, Syaiful, dan Supardi. 2002. Dasar-dasar Prilaku Organisasi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Anwar, W dan Haryadi. 2004. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. TKP3 KPK. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Berutu, Nasution dan Subhilhar, Simanjuntak. 2001. Metode Penyusunan Proposal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Medan: Percetakan Monora, Deal & Kennedy.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. 1982. Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allin and Bacon, Inc.
- Brenda, DuBois dan Milley, Karla Kongrud. 1992. Social Work An Empowering Profession. Boston: Allyn and Bacon.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial.
- Cahyani, Ati. 2003. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo
- Gibson. 2002. Organisasi Perilaku struktur proses, Terjemahan, Edisi V. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gugus, Tugas I. 2004. Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya. Jakarta: TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra.
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Cetakan Ke delapan belas. Yogyakarta: JBPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, S. P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Semantik*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hermawati, Istiana. 2013. *Kerangka Konseptual PANDU GEMPITA*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010.
- Jabrohim, dkk. (Ed). 2001. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jhones, Thomas. 1994. *Human Helping*, in *Journal of Corporate Social Performance and Policy*. Vol. 8, Connecticut. JAI Press, Greenwich: 29-30.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. 2013. *Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera* diakses pada www.kemsos.go.id
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera.
- Koentjaraningrat. 1994. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). 2003. *Arah dan Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya*. Surabaya: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Kosasih, H.R.E. 1998. *Metodologi Kualitatif (Pokok-pokok Ulasan dari Sisi Konsep, Karakteristik, Segi Keilmiah, dan Metode)*. Bandung: PPS Magister Ilmu Pemerintahan Setiagama.
- Kubicek, Herbert & Martin, Hagen. 2001. *One-Stop Government in Europe. An Overviezv*, www.egov.vic.gov.au/onestop.pdf. di akses 20 Juli 2015
- Lubis, S. M. Hari dan Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat antar Universitas Ilmu-ilmu sosial.
- Midgley. J. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI
- Mubyarto. 1996. *Menuju Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Mustaqim, Wahab. A. 1991. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Neuman, W.L. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- _____. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Toronto: Pearson.

- Neuman, W. L. & Kreuger, L. 2003. Social Work Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Patton, Michael. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage Publications.
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2008.
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012.
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Kota Payakumbuh. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013.
- Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2017. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2013
- Pemerintah Kota Payakumbuh. 2016. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010.
- Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Jakarta.

- Robbins. S dan Coulter. M. 2007. Manajemen edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Saharuddin. 2011. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sahdan. G. 2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Artikel Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan dalam Jurnal Ekonomi Rakyat (Maret 2005). http://ekonomirakyat.org/edisi_Maret2005/artikel_4.html diakses Juli 2015
- Soegijoko, B. Tjahjati. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Soekanto, Soerjono. 1993. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sofyandi, Herman dan Ganiwa, Iwa. 2007. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha ILMU
- Sudrajat, Subana. 2001. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Cetakan Pertama. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suharto, Edi. 2004. Permasalahan Kemiskinan di Perkotaan. Makalah Seminar. Bandung
- _____. 2006. Kebijakan Sosial, Makalah Seminar. Bandung.
- _____. 2008. Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial. Makalah Seminar. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Ekonometrika Pengantar. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suparlan, Parsudi. 1986. Masyarakat, Struktur Sosial, dalam Wijaya, individu, Keluarga, dan Masyarakat. Jakarta: CV. Akademi Pressindo.
- Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: PT. Obor Indonesia.
- Suparlan, Parsudi. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: Yayasan Obor
- Surachmad, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- Suranto, A.W. 2005. Komunikasi Perkantoran .Yogyakarta: Media Wacana.
- Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumah Tangga Miskin. [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Taufiq, Ahmad., Dewi Erowati dan Wijayanto. 2008. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal :Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. <http://www.foxitsoftware.com> diakses Juli 2015.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. Migrasi, Urbanisasi dan Pasar

- Kerja di Indonesia. Jakarta: UI Press
- Todaro, Michael P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Trochidis, Ilias. 2008. One-Stop Government: A Literature Review, http://www.fub.it/files/onestop_gov_literature_review.pdf diakses Juli 2015
- Ulhaq, Mahhub. 1983. Tirai Kemiskinan, Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga, terjemahan Masri Maris. Jakarta: Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 tentang Wilayah Kota Payakumbuh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Uphoff, Norman. T. 1986. Local Institutional Development. An Analytical Sourcebook with Cases. West Hartford Connecticut: Kumarian Press.
- Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- World Bank. 2007. Make The Indonesia Work For the Poor. Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region. Jakarta: The World Bank.
- Yin, Robert. K. 1987. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Farida. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta.

